

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME DI UPTD DINAS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

Oleh

Fiki Andri Arko dan Indra Syafri

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

Importance of local taxes as a cash receipts and local finances. to achieve this goal, local governments continue to improve and explore every potential. One source of revenue sizeable contribution and potential as a source of revenue is the advertisement tax. This study aims to identify and analyze the implementation of Advertisement Tax Payments in UPTD Department of Revenue District of Bengkalis Bengkalis. In this study, using the theory of Policy Evaluation according Winarno, indicators evaluating policies used include identifying the purpose of the program will be evaluated, the analysis of the problem, standardization activity, a measure of the level changes, the observed change of activities and indicators to determine the existence of impact , To know Evaluation of the advertisement tax payments in the District of Bengkalis the researchers took population and sample a total of 11 people including employees UPTD Revenue, and 26 people who are not paying taxes, while being key informants in this study is the Head of Revenue and Treasurer Recipients UPTD UPTD. The sampling technique is a technique Dispenda UPTD employee census and for people who do not pay taxes is purposive sampling. This study uses qualitative and quantitative data collection from respondents was conducted by distributing questionnaires, and selanjunya researchers conducted interviews, documentation and observation to know the results of the implementation of the payment of the advertisement tax. After data collection is done, then analyzed by using percentages to determine how many respondents stating done, quite materialize, or less accomplished. based on the analysis of the obtained results of the research done and it can be concluded that the implementation activities Payment of advertisement tax in UPTD Department of Revenue District of Bengkalis Bengkalis, from the employees that are in the category of "Done" and Society in the category "Simply Done", it is appropriate with comments and statements of the respondent.

Keywords: Evaluation of Policy, Taxes, and Signage

ABSTRAK

Pentingnya pajak daerah sebagai salah satu penerimaan kas dan keuangan daerah. untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar kontribusinya dan sangat potensial sebagai sumber penerimaan daerah adalah Pajak Reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis . Dalam penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan menurut Winarno, Indikator evaluasi kebijakan yang digunakan meliputi mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi, analisis terhadap masalah, Standarisasi kegiatan, pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi, perubahan yang diamati dari kegiatan, dan indikator untuk menentukan keberadaan dampak. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran pajak reklame di Kecamatan Bengkalis maka peneliti mengambil Populasi dan sampel berjumlah 11 orang yakni pegawai UPTD Dispenda, dan 26 masyarakat yang tidak membayar pajak, adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Dispenda dan Bendahara Penerima UPTD. Adapun teknik penarikan sampel pegawai UPTD Dispenda adalah Teknik sensus dan untuk masyarakat yang tidak membayar pajak adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan Kuantitatif , pengumpulan data dari responden dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, dan selanjunya peneliti melakukan wawancara, dokumentasi serta observasi untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pembayaran pajak reklame. Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik persentase untuk mengetahui seberapa banyak tanggapan responden yang menyatakan terlaksana, cukup terlaksana, atau kurang terlaksana. berdasarkan

analisis tersebut maka diperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dari pegawai berada pada kategori “Terlaksana” dan Masyarakat berada pada kategori “Cukup Terlaksana” , hal ini sesuai dengan tanggapan dan pernyataan dari para responden penelitian.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pajak, dan Reklame

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak reklame dikelola atau dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis secara langsung. Bidang-bidang yang mengurus pajak reklame ini yaitu bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan dan penghitungan. Selanjutnya, untuk pembayaran Pajak reklame dikelola oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis

Adapun dasar pengenaan Pajak Reklame ini sendiri adalah Nilai sewa reklame dalam hal reklame yang

diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dasar penggunaan reklame ini sendiri adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai objek Pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame. Selanjutnya mekanisme pembayaran Pajak reklame berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) menghitung dan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan nota perhitungan dan SKPD atau dokumen lainnya, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, membayar pajak yang telah ditetapkan dengan SKPD.

Tabel 1 : Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1	2011	120.000.000	197.643.988	164,7
2	2012	200.000.000	201.115.150	100,56
3	2013	200.000.000	224.841.794	112,42
4	2014	200.000.000	230.221.300	115,11
5	2015	209.564.459	325.266.926	155,21
Jumlah		929.564.459	1.179.089.158	648,00
Rata-rata		185.912.892	235.817.832	129,60

Sumber : Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah, 2016

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak reklame selama tahun pengamatan telah menunjukkan hasil yang maksimal yakni melebihi dari target yang ditetapkan, Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan. Sedangkan tahun

2015 pencapaiannya melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini bahwa penerimaan pajak reklame sudah hampir maksimal, namun perlu ditingkatkan lagi agar setiap tahunnya penerimaan pajak reklame bisa mencapai target.

Tabel 2 : Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2015

No	Tahun Anggaran	Pajak Reklame	Target PAD	Kontribusi (%)
1	2011	197.643.988	14.131.500.000	1,39%
2	2012	201.115.150	30.510.000.000	0,65%
3	2013	224.841.794	30.100.000.000	0,74%
4	2014	230.221.300	33.350.000.000	0,69%
5	2015	325.266.926	46.259.925.308	0,70%
Jumlah		1.179.089.158	154.351.425.308	0,76%
Rata-rata		235.817.832	30.870.285.062	0,84%

Sumber Data : Bidang Penagihan Dispenda, 2016

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,65% dan pada tahun 2014 hanya 0,69%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah secara keseluruhan dan hasilnya menunjukkan masih rendahnya kontribusi yang diberikan. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya penerimaan pajak terhadap PAD, dan

juga kurang antusiasnya wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya. Melihat kondisi tersebut maka untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah maka perlunya ketegasan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan kepada setiap wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang menunggak pajak dan tidak membayar pajak.

Tabel 3 : Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015

No	Kecamatan	Pajak Reklame	Target PAD	Kontribusi (%)
1	Mandau	75.625.320	12.880.809.250	0,58%
2	Pinggir	50.360.000	8.049.657.960	0,62%
3	Bukit Batu	41.754.500	4.321.290.709	0,96%
4	Siak Kecil	33.347.269	2.252.247.880	1,48%
5	Rupat	21.050.306	1.223.182.990	1,72%
6	Rupat Utara	19.234.354	1.220.154.000	1,57%
7	Bengkalis	54.940.520	11.750.818.590	0,46%
8	Bantan	28.954.657	4.561.763.929	0,63%
Jumlah		325.266.926	46.259.925.308	0,70%
Rata-Rata		40.658.366	5.782.490.664	0,70%

Sumber Data : Bidang Penagihan Dispenda, 2016

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Kontribusi Pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terendah adalah di Kecamatan Bengkalis

dengan 0,46%. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame yang ada di kecamatan Bengkalis belum maksimal dilaksanakan

Tabel 4 : Laporan Tunggakan Pajak Reklame Kecamatan Bengkalis Tahun 2013-2015

Tahun	Wajib Pajak	Wajib Pajak Bayar	Wajib Pajak Menunggak
2013	88	66	22
2014	96	87	9
2015	124	98	26

Sumber Data : Bidang Penetapan Dispenda, 2016

Berdasarkan tabel jumlah wajib pajak selama tiga tahun terakhir diketahui mengalami peningkatan yang disebabkan banyaknya pemakaian jasa reklame di Kecamatan Bengkalis serta usaha reklame ini sangat menjanjikan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Namun dari segi pembayaran pajak masih ada wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak reklamenya hal ini mengharuskan pemerintah mengeluarkan surat teguran pada wajib pajak

Berdasarkan Peraturan yang dijelaskan atas wajib pajak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bengkalis, maka penulis lebih memfokuskan penelitian di Kecamatan Bengkalis. Peranan UPTD Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pembayaran pajak reklame masih kurang optimal.

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa permasalahan ataupun fenomena yang dilihat diantaranya seperti:

1. Berdasarkan observasi Peneliti di lapangan masih adanya Wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, dalam hal ini masih adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran setelah jatuh tempo. Dengan alasan, masyarakat yang memiliki unit usaha yang memasang reklame, tetapi tempat usaha mereka sepi dengan pembeli

sehingga penghasilan mereka berkurang, membuat wajib pajak tidak mau membayar pajak reklame. Selain itu, adanya pihak-pihak setelah melakukan pemasangan reklame sulit untuk ditemui, baik perorangan maupun perusahaan karena berbagai alasan. Sehingga tidak melakukan pembayaran terhadap pajak reklame yang telah dipasang, Hal ini tidak terkumpulnya sumber penerimaan Pajak Reklame secara keseluruhan oleh petugas dilapangan.

2. Peneliti menemukan masih adanya pihak penyelenggara reklame yang belum memiliki izin (illegal), contohnya masih ada ditemui reklame yang dipasang tidak mempunyai stempel dari Dinas terkait sebagai bukti perizinan pemasangan reklame. Akibatnya banyak reklame liar yang terpasang oleh pihak penyelenggara reklame di Kecamatan Bengkalis
3. Berdasarkan observasi Peneliti dilapangan yakni kurangnya pengawasan dari Dinas Terkait dalam penertiban reklame yang tidak memiliki izin di Kecamatan Bengkalis.
4. Kurangnya pengawasan terhadap batas waktu izin pemasangan reklame. Misalnya, telah berakhir masa berlakunya izin Reklame tetapi tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, beberapa papan reklame yang masanya sudah habis tetapi masih tetap terpasang

tanpa adanya tindakan yang tegas dari pemerintah

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, yakni penelitian ini dapat memacu perkembangan Ilmu Administrasi Publik. Minimal dapat menjadi inventaris hasil-hasil penelitian di bidang ilmu Administrasi Publik.
2. Kegunaan Praktis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembayaran Pajak Reklame.
3. Kegunaan Akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan akademis yang ingin melihat kajian penelitian yang sama dalam meneliti sektor pajak reklame.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Menurut Siagian (dalam Athoillah, 2010;133) Administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama dan upaya (organisasi dan manajemen) yang bersifat sistematis, rasional dan manusiawi yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam pemberian pelayanan (Nawawi, 2013;77).

Konsep Manajemen

Terry (dalam Zulkifli, 2009;16) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara bertututan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Selain itu menurut Hasibuan (2006;2) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk suatu tujuan tertentu

Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok orang tau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksana usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu, menurut Friedrich (Dalam Lubis, 2007;7).

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya sesuatu masalah/hambatan tertentu, dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan untuk

mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson (dalam Nurcholis, 2007;263) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah

Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, outputs, dan outcome dari kebijakan pemerintah daerah. Evaluasi memiliki 4 tipe Menurut Badjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis, 2007; 276).

Operasional Variabel

Tabel 5 : Operasional variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kategori Ukuran
Evaluasi Kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Winarno, 201:229)	Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame	1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi	a. pendataan dan pembayaran Reklame b. pengidentifikasian lokasi Reklame	Ordinal
		2. Analisis terhadap masalah	a. Ketertiban Pembayaran Reklame b. Keteraturan Reklame	Ordinal
		3. Standarisasi kegiatan	a. Izin Dispenda b. Tertib penyelenggaraan Reklame	Ordinal
		4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi	a. Kegiatan pembayaran reklame b. Pendataan Pengelolaan Jumlah Reklame	Ordinal
		5. Perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan	a. Evaluasi Pembayaran Reklame b. Pengawasan c. Pelaporan	Ordinal
		6. Indikator untuk menentukan Keberadaan suatu Dampak	a. Dasar Penyelenggaraan b. Peraturan Bupati c. Konsep peraturan	Ordinal

Sumber: Modifikasi Peneliti, Tahun 2016

Menurut Abidin (2006;211) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan dan evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi awal, yaitu sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau *monitoring*
3. Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan

Teknik Pengukuran

Terlaksana : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, telah menjalankan enam indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori Terlaksana 67%-100%

Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, telah menjalankan satu hingga tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori Kurang terlaksana 0%-33%.

Cukup terlaksana : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, telah menjalankan empat hingga lima indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori Cukup terlaksana 34%-66%

Kurang terlaksana : Apabila Evaluasi Pelaksanaan

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif, penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dikantor UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Jln. Sri Pulau.

Populasi dan Sampel

Tabel 6 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala UPTD Dispenda	1	1	100%
2	Kepala Sub Bagian T.U	1	1	100%
3	Bendaharawan Penerima Pembantu	1	1	100%
4	Pegawai/ Staf UPTD	10	10	100%
Jumlah		13	13	100%

Sumber; Data UPTD Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2016

Tabel 7 : Jumlah Populasi dan Sampel masyarakat yang tidak membayar Pajak Reklame di Kecamatan Bengkalis

No	Jenis Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Masyarakat yang tidak Membayar Pajak	26	26	100%
Jumlah		26	26	100%

Sumber; Data UPTD Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2016

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari objek atau responden yang akan diteliti, seperti kepala UPTD Dispenda, bendahara penerima, serta masyarakat. data ini dikumpulkan untuk mengetahui keberhasilan terhadap pelaksanaan pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pelengkap yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau dengan menggunakan dokumen. Data ini juga dapat berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame Di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan responden, penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan dengan Kepala UPTD Dispenda dan Bendahara penerima, Dengan tujuan mendapatkan

informasi dan data yang tepat dari para responden.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan, terdiri dari kondisi UPTD Dinas Pendapatan Daerah dan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame yang dilakukan, Sehingga data yang dikumpulkan akan semakin lengkap.

3. Kuesioner/ Angket

Yaitu suatu teknik atau kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyebaran atau memberikan beberapa daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab yang disebarkan kepada Pegawai UPTD Dispenda dan masyarakat yang tidak membayar pajak reklame yang dijadikan sampel agar diketahui seberapa besar tanggapan para responden.

4. Dokumentasi

Yaitu data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, melalui dokumen seperti Peraturan Daerah dan serta dokumen lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, juga dilengkapi dengan foto. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah

penelitian bahan bukti, dan bahan analisa.

PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Pemabayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi yang cukup besar sehingga perlu adanya upaya pengoptimalannya. Adapun salah satu potensi pajak daerah yang cukup besar di Kecamatan Bengkalis adalah Pajak Reklame. Pajak reklame sebagai salah satu pajak daerah dalam pengelolaanya diadakan peningkatan terhadap PAD. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis Khususnya UPTD Dinas Pendapatan

Daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Pajak Reklame. Setelah dilakukan observasi dilapangan di Kecamatan Bengkalis oleh peneliti ditemukan permasalahan terhadap proses pembayaran pajak reklame. Hal ini perlu adanya Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis.

1. Mengidentifikasi Tujuan Program Yang Akan di Evaluasi

Yaitu tujuan yang dilakukan dengan cara menentukan apa yang menjadi program yang dilaksanakan oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Menyelenggarakan Pendataan dan pembayaran Pajak reklame, melakukan pengidentifikasian terhadap lokasi-lokasi yang layak untuk penyelenggaraan Reklame serta hal-hal yang diperlukan sebagai pendukung aturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Reklame.

Tabel 8 : Tanggapan Responden Pegawai UPTD Dinas Pendapatan daerah Kecamatan Bengkalis dilihat dari Indikator mengidentifikasi Tujuan Program yang akan di Evaluasi

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menyelenggarakan pendataan dan pembayaran pajak reklame yang dikelola UPTD Dinas Pendapatan Daerah	10 (91%)	1 (9%)	-	11 (100%)
2	Melakukan pengidentifikasian terhadap lokasi-lokasi Reklame.	11 (100%)	-	-	11 (100%)
	Jumlah	21	1	-	22
	Rata-rata	10	1	-	11
	Persentase	(91%)	(9%)	-	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti 2016

Sementara menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala UPTD Dinas Pendapatan daerah, beliau mengatakan

bahwa :“pihak UPTD sudah melaksanakan pendataan pajak reklame, setiap wajib pajak mendaftarkan reklamnya kepada pemerintah dalam hal

ini Dispenda, dalam jangka waktu 30 hari sebelum dimulai kegiatan, kemudian setelah didaftar akan didata oleh pihak Dispenda”.(wawancara dengan Bapak Erianto. SE, 15 agustus 2016)

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban

responden dalam bentuk tabel frekuensi. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran pajak reklame dari indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi berada pada kategori “Terlaksana”.

Tabel 9 : Tanggapan Responden Masyarakat wajib Pajak yang tidak membayar pajak Reklame di Kecamatan Bengkalis dilihat dari Indikator Mengidentifikasi Tujuan Program yang Akan di Evaluasi.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menyelenggarakan pendataan dan pembayaran pajak reklame yang dikelola UPTD Dinas Pendapatan Daerah	6 (23,1%)	18 (69,2%)	2 (7,7%)	26 (100%)
2	Melakukan pengidentifikasian terhadap lokasi-lokasi Reklame.	-	-	26 (100%)	26 (100%)
	Jumlah	6	18	28	52
	Rata-rata	3	9	14	26
	Persentase	(11,5%)	(34,6%)	(53,9%)	(100%)

Sumber : *Olahan Peneliti 2016*

Dapat disimpulkan bahwa bahwa dalam mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi dari hasil tanggapan responden masyarakat berada pada kategori Cukup Terlaksana, namun masih ada kendala-kendala dalam penyelenggaraan pendataan dan pembayaran pajak reklame

2. Analisis Masalah

Setelah mengidentifikasi tujuan yang akan dievaluasi maka langkah selanjutnya adalah Analisis terhadap masalah yakni, melihat permasalahan

yang terjadi di dalam suatu kebijakan, yang menjadi tugas dan tanggung jawab UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis.

Adapun masalah atau fenomena yang terdapat di Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame berdasarkan Observasi peneliti yaitu: Kurangnya ketertiban pembayaran Reklame, Kurang adanya keteraturan penyelenggaraan pembayaran pajak reklame yang diatur oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan Bengkalis.

Tabel 10 : Tanggapan Responden Pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis dilihat dari Indikator Analisis terhadap Masalah

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kurangnya ketertiban pembayaran Reklame	11 (100%)	-	-	11 (100%)
2	Kurang adanya keteraturan penyelenggaraan pembayaran pajak reklame.	8 (73%)	2 (18%)	1 (9%)	11 (100%)
	Jumlah	19	2	1	22
	Rata-rata	9	1	1	11
	Persentase	(82%)	(9%)	(9%)	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti, 2016

Hasil tanggapan responden dari Pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis, terhadap Indikator Analisis Terhadap masalah, dengan sub indikator Kurangnya ketertiban pembayaran reklame dijawab

11 orang pada kategori Terlaksana dengan persentase (100%), Jadi rata-rata responden menjawab Terlaksana dalam ketertiban pembayaran reklame. Hal ini bahwa ketertiban pembayaran reklame sudah terlaksana dengan baik

Tabel 11 : Tanggapan Responden Masyarakat atau wajib Pajak yang tidak membayar pajak Reklame di Kecamatan Bengkalis dilihat dari Indikator Analisis Terhadap Masalah

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kurangnya ketertiban pembayaran Reklame	6 (23,1%)	20 (76,9%)	-	26 (100%)
2	Kurang adanya keteraturan penyelenggaraan pembayaran pajak reklame.	2 (7,7%)	11 (42,3%)	13 (50%)	26 (100%)
	Jumlah	8	31	13	52
	Rata-rata	4	16	6	26
	Persentase	(15,4%)	(61,5%)	(23,1%)	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti, 2016

Dapat disimpulkan bahwa bahwa dalam analisis terhadap masalah dari hasil tanggapan responden masyarakat berada pada kategori Cukup Terlaksana, tetapi UPTD Dinas Pendapatan Daerah masih kurang efektif melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola pembayaran pajak reklame, karena dapat dilihat masih banyaknya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame dalam pelaksanaan pembayaran reklame.

3. Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan

Standarisasi kegiatan yaitu merupakan standar aturan yang harus dilakukan

terhadap Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penyelenggaraan

Reklame memiliki izin dari Dispenda, dan tertib penyelenggaraan reklame.

Tabel 12 : Tanggapan Responden Pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah dilihat dari Indikator Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan.

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Izin Dispenda	8 (73%)	3 (27%)	-	11 (100%)
2	Tertib penyelenggaraan Reklame	9 (82%)	2 (18%)	-	11 (100%)
	Jumlah	17	5	-	22
	Rata- rata	9	2	-	11
	Persentase	(82%)	(18%)	-	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti 2016.

Dari beberapa alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban responden dalam bentuk tabel frekuensi. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

pembayaran pajak reklame dari indikator deskripsi dan standarisai kegiatan dari jawaban responden pegawai berada pada kategori “Terlaksana”

Tabel 13 : Tanggapan Responden Masyarakat atau Wajib Pajak Reklame yang tidak membayar pajak reklame dilihat dari Indikator Deskripsi dan Standarisasi Kegiatan

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Izin Dispenda	6 (23,1%)	18 (69,2%)	2 (7,7%)	26 (100%)
2	Tertib penyelenggaraan Reklame	3 (11,5%)	20 (77%)	3 (11,5%)	26 (100%)
	Jumlah	9	38	5	52
	Rata- rata	5	19	2	26
	Persentase	(19,2%)	(73,1%)	(7,7%)	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti 2016

Dapat disimpulkan bahwa dalam Deskripsi dan standarisasi kegiatan tanggapan responden masyarakat berada pada kategori cukup terlaksana. hasil observasi peneliti bahwa UPTD Dinas Pendapatan Daerah kurang memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak yang

akan menyelenggarakan pemasangan reklame dan pembayaran reklame. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi peneliti masih banyakny reklame yang tidak memiliki izin penyelenggaraanya

4. Pengukuran Terhadap Tingkat Perubahan Yang Terjadi

Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi yaitu melihat kegiatan pembayaran reklame, melakukan pendataan dan pengelolaan

jumlah reklame. Indikator ini merupakan menjadi satu alat ukur yang digunakan untuk melihat dan menentukan baik serta tercapainya Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame yang di kelola oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis.

Tabel 14 : Tanggapan Responden Pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah dilihat dari Indikator pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kegiatan pembayaran Reklame	10 (91%)	1 (9%)	-	11 (100%)
2	Pendataan pengelolaan Jumlah Reklame	10 (91%)	1 (9%)	-	11 (100%)
	Jumlah	20	2	-	22
	Rata- rata	10	1	-	11
	Persentase	(91%)	(9%)	-	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti 2016

Responden pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah dengan indikator pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi dengan item Kegiatan pembayaran reklame yang menjawab Terlaksana ada 10 orang dengan persentase (91%) dan menjawab Cukup Terlaksana ada 1 orang dengan persentase (9%). Jadi rata-rata responden menjawab Terlaksana dalam kegiatan pembayaran reklame. Hal ini dapat dilihat kegiatan pembayaran reklame yang di kelola oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, item pendataan pengelolaan jumlah reklame dari hasil tanggap responden yang menjawab Terlaksana ada 10 orang dengan persentase (91%) dan yang menjawab Cukup Terlaksana ada 1 orang dengan persentase (9%). Jadi rata-rata responden menjawab Terlaksana dalam pendataan pengelolaan pajak reklame. Hal ini dengan alasan bahwa pendataan pengelolaan reklame terlaksana dilaksanakan oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis.

Tabel 15 : Tanggapan Responden Masyarakat atau wajib pajak yang tidak membayar pajak reklame dilihat dari Indikator Pengukuran Terhadap Tingkat Perubahan

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kegiatan pembayaran Reklame	4 (15,4%)	18 (69,2%)	4 (15,4%)	26 (100%)
2	Pendataan pengelolaan Jumlah Reklame	8 (30,8%)	17 (65,4%)	1 (3,8%)	26 (100%)
	Jumlah	12	35	5	52

	Rata-rata	6	17	3	26
	Persentase	(23,1%)	(65,4%)	(11,5%)	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti 2016

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti terhadap indikator pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi dari item kegiatan pembayaran reklame, bahwa kegiatan pembayaran reklame Cukup Terlaksana di Kecamatan Bengkalis.

Dapat disimpulkan dari pelaksanaan Pembayaran pajak reklame pada indikator Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi peneliti uraikan di atas dari hasil tanggapan responden

masyarakat yang tidak membayar pajak, kategori “cukup terlaksana”.

5. Perubahan Yang di Amati Merupakan Akibat Dari Kegiatan

Perubahan yang diamati dari kegiatan merupakan indikator langkah selanjutnya dalam mengevaluasi pelaksanaan Pembayaran Pajak reklame, pengawasan dan pelaporan reklame di Kecamatan Bengkalis.

Tabel 16 : Tanggapan Responden pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah dilihat dari Indikator Perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Evaluasi Pembayaran Reklame	9 (82%)	2 (18%)	-	11 (100%)
2	Pengawasan	11 (100%)	-	-	11 (100%)
3	Pelaporan	11 (100%)	-	-	11 (100%)
	Jumlah	31	2	-	33
	Rata-rata	10	1	-	11
	Persentase	(91%)	(9%)	-	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti 2016

Tanggapan responden pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah dengan item Evaluasi Pembayaran Reklame yang menjawab Terlaksana ada 9 orang dengan persentase (82%) dan yang menjawab

Cukup Terlaksana ada 2 orang dengan persentase (18%). Hal ini dengan alasan bahwa evaluasi pembayaran reklame terlaksana dilakukan oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerah.

Tabel 17 : Tanggapan Responden Masyarakat atau wajib Pajak yang tidak membayar pajak reklame dilihat dari Indikator Perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Evaluasi Pembayaran Reklame	4 (15,4%)	22 (84,6%)	-	26 (100%)

2	Pengawasan	6 (23%)	8 (30,8%)	12 (46,2%)	26 (100%)
3	Pelaporan	7 (27%)	16 (61,5%)	3 (11,5%)	26 (100%)
	Jumlah	17	46	15	78
	Rata-rata	6	15	5	26
	Persentase	(23,1%)	(57,7%)	(19,2%)	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti 2016

Hal ini melihat bahwa UPTD Dinas Pendapatan Daerah masih belum melaksanakan pelaksanaan pembayaran pajak reklame. Hal ini perlu pengevaluasian dari pihak Dinas.

6. Indikator Untuk Menentukan Keberadaan Dampak

Yaitu Keberadaan Suatu dampak yaitu kondisi yang timbul karena adanya dasar dampak yang telah ada.

Tabel 18 : Tanggapan Responden Pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah dilihat dari Indikator Untuk Menentukan keberadaan Dampak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Dasar Penyelenggara	11 (100%)	-	-	11 (100%)
2	Peraturan Bupati	11 (100%)	-	-	11 (100%)
3	Konsep Peraturan	10 (91%)	-	1 (9%)	11 (100%)
	Jumlah	32	-	1	33
	Rata-rata	10	-	1	11
	Persentase	(91%)	-	(9%)	(100%)

Sumber : Olahan Peneliti 2016

Alasan yang dikemukakan diatas dan paparan jawaban responden dalam bentuk tabel frekuensi. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran pajak

reklame pada indikator untuk menentukan keberadaan dampak. Dari jawaban responden Berada pada kategori terlaksana.

Tabel 19 : Tanggapan Responden Masyarakat atau wajib pajak yang tidak membayar pajak reklame dilihat dari Indikator Untuk Menentukan keberadaan Dampak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Dasar Penyelenggara	4 (15,4%)	11 (42,3%)	11 (42,3%)	26 (100%)
2	Peraturan Bupati	4 (15,4%)	20 (76,9%)	2 (7,7%)	26 (100%)
3	Konsep Peraturan	6 (23,1%)	17 (65,4%)	3 (11,5%)	26 (100%)
	Jumlah	14	48	16	78

Rata-rata	5	16	5	26
Persentase	(19%)	(62%)	(19%)	(100%)

Sumber : *Olahan Peneliti 2016*

Maka dapat disimpulkan hasil observasi peneliti bahwa UPTD Dinas Pendapatan Daerah kurang melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, selain itu masyarakat yang menyelenggarakan

reklame belum mematuhi aturan yang ditetapkan dinas terkait.kurangnya sosialisasi dari pihak Dispenda bersama pihak UPTD Dinas Pendapatan daerah

Tabel 20 : Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Pegawai UPTD Dinas Pendapatan Daerah dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi	10 (91%)	1 (9%)	-	11 (100%)
2	Analisis terhadap masalah	9 (82%)	1 (9%)	1 (9%)	11 (100%)
3	Deskripsi dan standarisasi kegiatan	9 (82%)	2 (18%)	-	11 (100%)
4	Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi	10 (91%)	1 (9%)	-	11 (100%)
5	Perubahan yang diamati dari kegiatan	10 (91%)	1 (9%)	-	11 (100%)
6	Indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak	10 (91%)	-	1 (9%)	11 (100%)
	Jumlah	58	6	2	66
	Rata-rata	9	1	1	11
	Persentase	(82%)	(9%)	(9%)	(100%)

Maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame Di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis bahwa tanggapan berbagai responden dalam penelitian ini Termasuk dalam Kategori Terlaksana , kesimpulan

ini sesuai dengan teknik pengukuran yang telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori Terlaksana dengan Persentase (82%). Karena UPTD Dinas Pendapatan Daerah telah melaksanakan tugas nya dengan baik dalam pelaksanaan Pembayaran pajak reklame di Kecamatan Bengkalis.

Tabel 21 : Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Masyarakat yang tidak membayar Pajak Reklame dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di Kecamatan Bengkalis

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi	3 (11,5%)	9 (34,6%)	14 (53,9%)	26 (100%)

2	Analisis terhadap masalah	4 (15,4%)	16 (61,5%)	6 (23,1)	26 (100%)
3	Deskripsi dan standarisasi kegiatan	5 (19,2%)	19 (73,1%)	2 (7,7%)	26 (100%)
4	Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi	6 (23,1%)	17 (65,4%)	3 (11,5%)	26 (100%)
5	Perubahan yang diamati dari kegiatan	6 (23,1%)	15 (57,7%)	5 (19,2%)	26 (100%)
6	Indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak	5 (19%)	16 (62%)	5 (19%)	26 (100%)
	Jumlah	29	92	35	156
	Rata-rata	5	15	6	26
	Persentase	(19,2%)	(57,8%)	(23%)	(100%)

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2016

Maka hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dari tanggapan responden masyarakat dikatakan Cukup Terlaksana dengan persentase (57,8%), kesimpulan ini sesuai dengan teknik pengukuran yang

Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD Dispenda kepada wajib pajak mengenai Pajak Reklame, sehingga masyarakat kurang mengetahui aturan yang mengatur tentang pajak reklame, dengan kurangnya kegiatan sosialisasi ini maka membuat wajib pajak tidak mentaati aturan yang mengatur tentang pajak. Hal ini membuat mereka cenderung apatis dan menunggak pembayaran pajak setelah lewat jatuh tempo.
2. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk membayar Pajak Reklame, dalam hal ini wajib pajak tidak antusias dalam membayar pajak.

telah ditetapkan bahwa yang dikatakan kategori Cukup Terlaksana dengan Persentase (57,8%). Karena masyarakat atau wajib pajak masih belum mentaati aturan terhadap penyelenggaraan pajak reklame. Hal ini dapat dilihat masih adanya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak reklame

3. Kurangnya pengawasan serta sanksi yang tegas dari pihak Dispenda kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak reklame sebagaimana telah diatur didalam peraturan daerah. Sehingga wajib pajak yang melakukan pelanggaran tidak diberi hukuman atau sanksi tegas yang telah diatur didalam peraturan daerah.

Kesimpulan

1. Dari seluruh jawaban responden penelitian mengenai variabel Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada Indikator mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi dilihat pada jumlah jawaban responden pegawai 10 dengan persentase (91%) dikategori

- Terlaksana, sedangkan jawaban dari responden masyarakat dengan jumlah 14 persentase (53,9%) di kategori Kurang Terlaksana.
- 2 Dari seluruh jawaban responden penelitian mengenai variabel Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada Indikator analisis terhadap masalah jumlah jawaban responden pegawai 9 dengan persentase (82%) dikategori terlaksana, sedangkan jawaban responden
 - 3 masyarakat dengan jumlah 16 persentase (61,5%) di kategori Cukup Terlaksana.
 - 4 Dari seluruh jawaban responden penelitian mengenai variabel Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada Indikator standarisasi kegiatan jawaban responden pegawai 9 dengan persentase (82%) dikategori terlaksana, sedangkan jawaban responden masyarakat 19 persentase (73,1) di kategori Cukup Terlaksana
 - 5 Dari seluruh jawaban responden penelitian mengenai variabel Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada Indikator pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi jawaban responden pegawai 10 dengan persentase (91%) di kategori Terlaksana, sedangkan jawaban responden masyarakat 17 persentase (65,4%) dikategori Cukup terlaksana. Dari seluruh jawaban responden penelitian mengenai variabel Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis

- Kabupaten Bengkalis pada Indikator perubahan yang diamati dari kegiatan jawaban responden pegawai 10 dengan persentase (91%) dikategori terlaksana, sedangkan jawaban responden masyarakat 15 persentase (57,7%) di kategori Cukup terlaksana
- 6 Dari seluruh jawaban responden penelitian mengenai variabel Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada Indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak jawaban responden pegawai 10 dengan persentase (91%) dikategori Terlaksana, sedangkan jawaban responden masyarakat 16 persentase (62%) di kategori cukup terlaksana.
 - 7 Dapat disimpulkan dari hasil rekapitulasi keseluruhan Indikator maka Jawaban dari responden pegawai UPTD Dispenda yaitu berjumlah 58 dengan persentase (82%) berada pada kategori terlaksana, sedangkan jawaban dari responden masyarakat yakni berjumlah 92 dengan persentase (57,8%) berada pada kategori Cukup Terlaksana.

Saran

1. Untuk mencapai target pajak Reklame pihak UPTD Dispenda sebaiknya harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat secara rutin, Sehingga masyarakat dapat mengetahui arti penting akan kewajiban dalam membayar pajak.
2. Diharapkan kesadaran dan peran serta masyarakat lebih ditingkatkan lagi dan memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak reklame
3. Sebaiknya dilakukan pengawasan secara rutin pada setiap pembayaran Pajak Reklame di Kecamatan Bengkalis serta pihak UPTD Dispenda

harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak

Daftar Kepustakaan

- Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Setia
- Amirullah, dan Haris, Budiono, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azwirman, dkk. 2015. *Perpajakan. Edisi Pertama*. Pekanbaru: UIR Press
- Bohari, H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Brantas, M.Pd. 2009. *Dasar- Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Gomes Faustino Agustino, 2006. *Produktivitas dalam Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Handoko, T. Hani, 2009, *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan , Malayu S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi ketujuh Belas, Jakarta: Bumi Aksara
- Kencana, Syafii Inu, 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Rosda
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Thaliziduhu. 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* III. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Siagian, P Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang administrasi publik*. Jakarta: Erlangga
- Syamsudin, Sadili, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia
- Syaukani, dkk, 2002. *Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tisnawati, Sule, Ernie & Saefullah, Kurniawan. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisai dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Budi, 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implimentasi Kebijakan Negara*. Malang: Bumi Aksara

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS.

Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Proses*, Jakarta: Rajawali Press.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press

Dokumentasi

Katalog BPS, 2016. *Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2016*.

Katalog BPS, 2015. *Kecamatan Bengkulu Dalam Angka 2015*.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRB).

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.